

PERSEPSI SISWA TENTANG NILAI KEMANDIRIAN PADA PENDIDIKAN ANTIKORUPSI (STUDI DI SMK)

Nela Suryaningtyas, Siswandari, Nurhasan Hamidi*

*Pendidikan Akuntansi, FKIP Universitas Sebelas Maret

Surakarta, 57126, Indonesia

nelasurya45@gmail.com

ABSTRACT

The aims of this study were to investigate: 1) Students' perceptions the value of independence viewed from the social aspect of Anti-Corruption Education; (2) Students' perceptions the value of independence viewed from the economic aspect of Anti-Corruption Education. This research was descriptive qualitative research. The population of this research was grade X student of class accounting of SMK in the 2018/2019 academic year. In this research, there were ten students as informant. The source date of this research were informant, document, picture, record, and the location of research. This research collected the data by using interview, observation, and document. Sampling technic used was purpose sampling. The analysis used was interactive analysis. The data validities used were source and method triangulation. The result of this research showed that 1) student's social aspect was positive. That was evidenced by students having adequate knowledge about the act of corruption by realizing that they have potential to commit corruption. Students strongly supported the efforts to eradicate corruption by Anti-corruption Education. The independence of this social aspect was also evidenced by the attitude of students always completing their work without having to always rely on the help of others, having an effort to improve personal independence, and having the ability to interact with others well. 2) students' economic aspect had negative perception evidenced by students not being able to distinguish between fulfilling needs and desires. Students tended to be consumptive in allocating the finance that they had. Consumptive life made students less inclined to set aside part of their finances.

Keywords: student's perception, independence value, anti-corruption education.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) persepsi siswa mengenai nilai kemandirian yang ditinjau dari aspek sosial pada Pendidikan Antikorupsi, 2) persepsi siswa mengenai nilai kemandirian yang ditinjau dari aspek ekonomi pada Pendidikan Antikorupsi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X bidang keahlian akuntansi SMK tahun ajaran 2018/2019. Jumlah informan pada penelitian ini adalah 10 siswa. Sumber data penelitian ini adalah informan, dokumen, gambar, rekaman, dan lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Model analisis yang digunakan adalah analisis interaktif. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) aspek sosial siswa memiliki persepsi positif. Hal ini dibuktikan dengan siswa memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tindakan korupsi dengan menyadari bahwa dirinya berpotensi melakukan korupsi. Siswa sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan Pendidikan Antikorupsi. Kemandirian aspek sosial ini dibuktikan pula dengan sikap siswa selalu menuntaskan pekerjaannya tanpa harus selalu mengandalkan bantuan orang lain, memiliki upaya meningkatkan kemandirian personal, dan memiliki kemampuan berinteraksi dengan baik terhadap orang lain. 2) aspek ekonomi memiliki persepsi negatif, dibuktikan dengan siswa belum dapat membedakan antara pemenuhan kebutuhan dengan keinginan. Siswa cenderung konsumtif dalam mengalokasikan keuangan yang dimiliki. Hidup konsumtif menjadikan siswa cenderung tidak mampu menyisihkan sebagian dari keuangannya.

Kata kunci: persepsi siswa, nilai kemandirian, pendidikan antikorupsi.

PENDAHULUAN

Generasi muda saat ini semakin mengalami krisis karakter dan intelektualitas dalam level yang memprihatinkan. Krisis karakter bukan hanya terjadi pada generasi muda saja, akan tetapi dapat terjadi pada berbagai lapisan masyarakat. Krisis karakter yang terjadi dapat ditandai dengan semakin banyaknya perilaku menyimpang yang berkaitan dengan moral generasi muda dan masyarakat saat ini. Krisis karakter dapat dilihat dari adanya berbagai tuntutan di masyarakat. Salah satu yang menjadi tuntutan di masyarakat sehingga dapat memengaruhi krisis karakter individu yaitu fenomena sosial yang saat ini sedang berkembang (Amri, Jauhari & Elisah, 2011: 5). Krisis karakter yang saat ini terjadi pada generasi muda harus segera ditindaklanjuti, supaya tidak mengarah pada tindakan yang lebih besar seperti tindakan korupsi. Tindakan korupsi di Indonesia saat ini sudah sedemikian rumit sehingga sangat sulit untuk memulai memperbaiki masalah tersebut. Tindakan korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja mulai dari diri sendiri, kalangan pejabat, akademisi, generasi muda, maupun masyarakat biasa.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa tindakan korupsi adalah suatu tindakan individu untuk melawan hukum dengan maksud ingin memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Tindakan korupsi dapat dikatakan melawan hukum apabila tindakan itu dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mencakup penyuaipan (*bribery*), konflik kepentingan (*conflicts of interest*), pemaksaan yang bersifat ekonomi

(*economic exortion*), dan pemberian secara tidak sah (*illegal gratuities*) (Suradi, 2006: 17). Pada kenyataannya bangsa ini mengalami kesulitan dalam melakukan pemberantasan korupsi karena begitu kompleksnya permasalahan korupsi yang erat kaitannya dengan pelaku korupsi dan aturan penegak hukum yang memiliki peran dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Hasil survey *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menilai hingga tahun 2018, angka kasus korupsi di Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Hasil catatan ICW selama 2017 ada 576 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun dan kasus suap senilai Rp 211 miliar, serta jumlah tersangka mencapai 1.298 orang. Menurut *Anti Corruption Clearing House* (ACCH) per 31 Desember 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penanganan tindak pidana korupsi pada tahun 2018 dengan penyelidikan sebanyak 164 perkara, penyidikan sebanyak 199 perkara, penuntutan sebanyak 151 perkara, dan eksekusi sebanyak 113 perkara. Mirisnya angka tindak pidana korupsi tersebut terus naik dari tahun ke tahun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa saat ini korupsi dianggap sumber malapetaka yang akan membuat semakin terbelenggunya bangsa ini dari kemiskinan dan kesengsaraan.

Mengacu dari hasil *survey* di atas, dapat dikatakan bahwa tindakan korupsi penting untuk segera ditindaklanjuti. Tindakan korupsi ini dikatakan penting karena korupsi dapat memperlambat perkembangan ekonomi, sosial, menyebabkan ketidakpercayaan pada pihak berwenang, dan krisis sosial (Mamitova, et al, 2016). Rumitnya tindak korupsi yang terjadi saat ini karena tindakan korupsi dapat menurunkan kesejahteraan sosial, merusak sistem ekonomi,

dan meningkatkan angka kemiskinan (Capasso & Santoro, 2018: 103).

Kasus korupsi di atas juga dapat terjadi pada tingkat Sekolah Menengah, diantaranya adalah penyalahgunaan jabatan seperti bendahara di kelas yang memanfaatkan posisinya untuk memanipulasi catatan keuangan, perbuatan curang siswa dengan menggunakan uang pembayaran sekolah atau SPP untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan orang tua, terdapat siswa yang tidak bersungguh-sungguh pada saat menjalankan praktik di laboratorium, dan terdapat beberapa siswa yang belum memiliki jiwa kemandirian secara merata, hal ini dapat terlihat seperti siswa belum aktif untuk mencari informasi pelajaran, masih kurangnya kemampuan inisiatif siswa untuk bertanya, pada saat proses diskusi masih terdapat siswa yang terlihat belum menunjukkan kesungguhan dalam menjalankan tugasnya, dan hanya menggantungkan tugasnya kepada orang lain.

Pentingnya permasalahan berdasarkan fenomena yang ada di atas, salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan terkait dengan krisis karakter yang mengarah pada tindakan korupsi adalah melalui upaya antikorupsi. Maka berpendapat bahwa peluang tindakan korupsi dapat dicegah salah satunya dengan kebijakan antikorupsi (Pratama & Sumaryati, 2015: 159). Pencegahan yang dimaksud dalam topik ini adalah dengan meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan individu juga menyadari tanggungjawabnya untuk bisa menyelamatkan uang, barang, maupun semua aset yang dimiliki oleh negara. Peluang berkembangnya tindakan korupsi dapat dicegah pula

dengan melakukan perbaikan sistem hukum dan kelembagaan.

Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada aspek penegakan hukum belaka (*law enforcement*), akan tetapi juga ditentukan oleh aspek pendidikan. Pendidikan saat ini memiliki andil yang besar untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di masyarakat khususnya permasalahan terkait dengan tindakan korupsi. Salah satu upaya pendidikan yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi yakni dengan upaya pendidikan antikorupsi. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit istilah pendidikan antikorupsi tidak disebutkan secara rinci.

Pendidikan antikorupsi harus dapat dipandang sebagai hasil inovasi pendidikan yang dapat mengatasi permasalahan terkait dengan tindakan korupsi saat ini terutama dalam bidang pendidikan. Pendidikan antikorupsi adalah upaya mencegah terjadinya perbuatan korupsi dengan memberikan pemahaman pada siswa terkait seluk beluk korupsi yang bisa dilakukan dalam proses pembelajaran di sekolah (Gurning, Mudjiman & Haryanto, 2014: 94). Pendidikan antikorupsi juga dapat dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal di keluarga, serta pendidikan nonformal di masyarakat untuk mengatasi tindakan korupsi (Wijaya, 2014: 24).

Upaya pemberantasan korupsi melalui pendidikan antikorupsi ini dimaksudkan sebagai langkah preventif pencegahan terjadinya korupsi pada generasi muda. Strategi ini dianggap penting karena memiliki dampak yang positif dalam mengatasi dan menanggulangi tindakan korupsi sejak dini. Hanya saja pendekatan preventif un-

tuk mengatasi permasalahan saat ini memang tidak dapat dinikmati secara langsung manfaatnya, akan tetapi dapat dirasakan hasilnya dalam jangka panjang. Pendidikan antikorupsi pada hakikatnya bertujuan supaya siswa mempunyai pemahaman sejak dini tentang tindakan korupsi, siswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi (*individual competensi*), mampu mengajak dan mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan korupsi dengan cara memberikan teguran dan peringatan, siswa memiliki kepekaan lingkungan dengan mendeteksi sedini mungkin apabila adanya tindakan korupsi, mampu menolak setiap bentuk korupsi secara tegas, dan melaporkan tindakan korupsi kepada pihak yang terkait.

Pada upaya pendidikan antikorupsi ini siswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai yang diharapkan pada pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi dapat menjadi salah satu upaya untuk merubah persepsi siswa dari sikap membiarkan atau menerima tindakan korupsi menuju sikap menolak korupsi dalam bentuk apapun terutama melalui nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan baik apabila siswa memiliki pengetahuan dan persepsi yang memadai mengenai pendidikan antikorupsi. Pada upaya pendidikan antikorupsi terdapat nilai-nilai antikorupsi yang dapat diberikan pada saat di sekolah untuk mengatasi permasalahan terkait dengan krisis karakter pada siswa. Rumusan yang telah ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat sembilan nilai dasar yang perlu ditanamkan dan diperkuat melalui pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah yaitu nilai kejujuran, mandiri, adil, berani, hidup sederhana, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, dan peduli (Wijaya, 2014: 87). Nilai-nilai terse-

but dapat diterapkan pada siswa khususnya jurusan akuntansi melalui pendidikan antikorupsi yang dapat diajarkan oleh guru pada saat di kelas maupun di lingkungan sekolah. Siswa jurusan akuntansi ini dianggap penting untuk mendapatkan pendidikan antikorupsi karena siswa jurusan akuntansi erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan pada saat proses pembelajaran maupun pada kehidupan sehari-hari.

Keseluruhan nilai-nilai dari pendidikan antikorupsi sangat penting untuk diterapkan pada siswa. Penerapan pendidikan antikorupsi dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter antikorupsi pada pembelajaran dan dapat pula melalui pembiasaan sikap positif pada kehidupan sehari-hari. Berdasarkan fenomena permasalahan di atas, guru dapat memfokuskan nilai karakter antikorupsi secara lebih mendalam yaitu terkait nilai kemandirian.

Kemandirian dapat diartikan (*self reliance*) adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengelola semua hal yang dimiliki berupa pengelolaan waktu, berani mengambil risiko, dapat bertindak secara mandiri, dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi (Qonumi, 2015: 50). Nilai kemandirian merupakan rasa kemauan seseorang dan kemampuan untuk dapat merealisasikan keinginan dan kehendak diri dengan baik melalui perbuatan atau tindakan nyata sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang dapat berguna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Siswa perlu diajarkan dan diberikan pemahaman terkait dengan nilai kemandirian supaya dapat memahami perbedaan antara sikap mandiri dengan sikap hanya berpikir untuk diri sendiri sebab jika hal tersebut tidak dipahami dengan baik, maka bahayanya siswa akan mem-

iliki sifat yang individual dan kecenderungan tidak peduli pada sesama dan lingkungan.

Penelitian ini memfokuskan pada nilai kemandirian, nilai ini dianggap penting karena dapat dijadikan sebagai fokus mengatasi permasalahan yang ada dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan yang di dalamnya tercantum Standar Kompetensi Lulusan pada satuan Pendidikan Menengah Kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejurumannya. Hal tersebut diharapkan lulusan SMK selain memiliki kecerdasan intelektual, akhlak yang mulia, keterampilan, tetapi juga memiliki kepribadian yang mandiri untuk bekal masa depan yaitu dengan bekerja, berwirausaha atau melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Alasan lain mengenai pentingnya nilai kemandirian ini bagi siswa karena nilai ini mencakup perilaku individu yang mampu secara mandiri menentukan masa depan, individu dapat melakukan sesuatu tanpa harus selalu mengandalkan bantuan dari orang lain, mampu berinisiatif dalam hal positif, mempunyai rasa percaya diri, dan mampu mengatasi hambatan atau masalah yang dihadapi (Wijaya, 2014). Kemandirian ini perlu dimiliki oleh setiap siswa karena dapat menentukan perkembangan hidupnya sampai pada tahap dewasa di mana terdapat berbagai tuntutan dan tantangan untuk membuat keputusan bagi dirinya terutama pada saat di lingkungan sosial masyarakat dan pemenuhan ekonomi

secara personal. Seseorang harus mampu mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya sebab tidak mungkin orang yang tidak dapat mandiri (mengatur dirinya sendiri) akan mampu mengatur hidup orang lain. Menurut Wijaya (2014) individu yang mandiri akan memiliki sikap 3 R yaitu *Realible* (dapat diandalkan), *Responsible* (orang yang selalu bertanggung jawab), dan *Reasonable* (beralasan berdasarkan pemikiran dan tujuan yang jelas).

Pendidikan antikorupsi ini dapat menjadi salah satu upaya untuk dapat membangun generasi muda antikorupsi yang terfokus pada nilai kemandirian yang dapat ditinjau pada aspek sosial dan aspek ekonomi. Pada kenyataannya setiap individu adalah makhluk sosial, maka hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap individu harus memiliki kemandirian terfokus pada aspek sosial. Kemandirian yang terfokus pada aspek sosial ini dianggap penting menurut Santrock (2008) karena individu yang tidak cukup mandiri akan memiliki kesulitan dalam hubungan pribadi yang sehat dengan lingkungan sosial (Dayati, 2017: 34). Pendapat tersebut dapat diketahui bahwa kemandirian pada aspek sosial ini merupakan kemandirian dalam penyesuaian diri setiap individu di lingkungannya. Kemandirian yang ditinjau dari aspek ekonomi juga sangat penting bagi siswa karena berkaitan dengan kemampuan siswa dalam mengatur keuangan sendiri mungkin dan kemampuan itu akan sangat berpengaruh terhadap pemahaman dan pengetahuan siswa tentang keuangan di masa yang akan datang.

Kemampuan pengelolaan keuangan menjadi sangat penting untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari karena digunakan untuk menghadapi situasi krisis yang bisa terjadi setiap saat (Rapih, 2016: 15). Kemampuan pengelolaan keuangan juga sangat diperlukan untuk mempersiapkan kebutuhan siswa di masa yang akan datang terlebih siswa SMK ini masuk pada jurusan akuntansi yang pada kenyataannya diharapkan mampu mengelola keuangan pribadi dengan bertanggungjawab dan bijaksana. Pemecahan permasalahan korupsi dengan pendidikan antikorupsi dapat dilakukan dengan optimal apabila siswa memahami dan memiliki persepsi yang positif mengenai upaya pendidikan antikorupsi terutama pada nilai kemandirian, sehingga dapat diharapkan siswa mampu secara mandiri dalam kehidupannya di lingkungan manapun.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi siswa jurusan akuntansi mengenai nilai kemandirian yang ditinjau dari aspek sosial pada pendidikan antikorupsi, dan persepsi siswa jurusan akuntansi mengenai nilai kemandirian yang ditinjau dari aspek ekonomi pada pendidikan antikorupsi di SMK. Pada penelitian ini untuk mengetahui persepsi siswa mengenai aspek sosial dapat dilihat melalui kriteria rubrik persepsi dan matrik persepsi yang berisikan hasil wawancara dengan informan. Pada aspek ekonomi juga dapat dilihat melalui kriteria rubrik persepsi dan matrik persepsi yang berisikan hasil wawancara dengan informan berkaitan dengan pengalokasian keuangan dalam kehidupan sehari-hari khususnya pada saat di sekolah.

Persepsi

Setiap individu tentu memiliki perbedaan pendapat atau pandangan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Persepsi merupakan suatu proses stimulus yang diterima oleh individu yang berupa pengorganisasian dan interpretasi terhadap sesuatu objek yang memiliki makna dan merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri setiap individu (Walgito, 2010: 54). Persepsi dapat dikatakan sebagai aktivitas yang *integrated* karena seluruh individu ikut berperan aktif dalam adanya persepsi dari objek yang ada. Persepsi yang dirasakan setiap individu memang bermula dari penginderaan yang akan menghasilkan suatu informasi sehingga membangun kesan dan membuat penilaian dari suatu objek. Hal ini dapat dipahami bahwa siswa harus memiliki kesan dan penilaian yang baik mengenai upaya pendidikan antikorupsi, sehingga siswa akan memiliki persepsi dan pengetahuan yang positif mengenai upaya tersebut.

Persepsi yang diterima individu dapat diartikan sebagai pemahaman atau sudut pandang yang masuk ke dalam otak manusia melalui pengalaman-pengalaman yang mereka ketahui dan rasakan sehingga menjadi sebuah pesan baik itu dalam hal positif maupun negatif yang dapat memberikan suatu makna terhadap objek tertentu. Persepsi yang berupa informasi dapat diterima individu dengan panca indera baik melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi perbedaan persepsi itu sangatlah beragam. Terdapat faktor-faktor yang dapat memengaruhi persepsi yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang ada di sekitar orang tersebut. Faktor internal dapat berupa sikap, pengetahuan, minat, motivasi perhatian, dan pengalaman yang berasal dari diri seseorang. Faktor eksternal dapat berasal dari luar individu itu sendiri seperti lingkungan dan situasi yang dimiliki oleh setiap individu (Walgito, 2010: 70-

71). Persepsi seseorang tentu dialami berdasarkan proses yang ada, proses persepsi tentu memiliki uraian-uraian yang saling berhubungan dan mempunyai sifat kompleks. Proses terbentuknya persepsi akan terjadi apabila individu merasakan stimulus-stimulus yang berasal dari suatu objek lalu ditangkap oleh panca indera, lalu stimulus tersebut diinterpretasi atau diterjemahkan oleh syaraf otak kemudian timbul respon terhadap objek yang ditangkap oleh panca indera, respon inilah yang disebut sebagai persepsi (Walgito, 2010: 102).

Pendidikan Antikorupsi

Tindakan korupsi yang sudah semakin rumit ini perlu adanya upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satunya dengan upaya pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi diartikan oleh Wibowo (2013: 38) yang menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Berdasarkan hal tersebut pendidikan antikorupsi bukan hanya sekedar media pengalihan pengetahuan (kognitif) saja, namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif) dan kesadaran moral siswa dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimpangan perilaku korupsi. Pendidikan antikorupsi memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang memiliki integritas antikorupsi, mengembangkan potensi siswa terutama pada ranah afektif, menanamkan jiwa kepemimpinan yang profesional, dan menumbuhkan sikap dan kebiasaan yang terpuji (Wijaya, 2014: 25).

Nilai Kemandirian

Saat ini generasi muda memiliki tuntutan yang sangat besar terhadap kemandirian. Berdasarkan

rumusan yang telah ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nilai kemandirian dapat diwujudkan dengan sikap selalu menuntaskan pekerjaannya tanpa harus mengandalkan bantuan dari orang lain dan tidak menyuruh atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk sesuatu urusan yang mampu dikerjakan sendiri (Wijaya, 2014: 87). Kemandirian adalah suatu keadaan di mana seseorang mau dan mampu mewujudkan kehendak atau keinginan diri dalam tindakan atau perbuatan nyata agar menghasilkan sesuatu (barang/jasa) demi pemenuhan kebutuhannya (Wijaya, 2014: 133). Karakter dari nilai kemandirian ini penting untuk dimiliki oleh setiap individu terutama pada siswa, hal tersebut dapat dikatakan penting karena pada nilai ini seseorang diharapkan untuk tidak terlalu sering bergantung dengan masyarakat setitar. Nilai kemandirian pada penelitian ini dapat dilihat melalui dua aspek yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi. Kemandirian pada aspek sosial ini dapat ditunjukkan dengan kemampuan berinteraksi dengan orang lain tanpa tergantung dan menunggu aksi dari orang lain, membantu orang lain yang mengalami kesulitan atas kemauannya sendiri tanpa paksaan dan perintah dari orang lain (Wijaya, 2014: 36). Kemandirian dalam aspek ekonomi berkaitan dengan selalu melakukan persaingan secara sehat, tidak melakukan suap, tidak boros dalam memanfaatkan sumber daya, dan kemampuan seseorang untuk menjaga kondisi ekonomi dirinya dengan baik sesuai dengan kebutuhannya (Wijaya, 2014: 39).

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di SMK tahun pelajaran 2018/2019. Alasan pemilihan SMK sebagai objek penelitian karena ingin mengetahui persepsi siswa tentang nilai kemandirian pada pendidikan antikorupsi, sekolah juga memiliki harapan untuk menjadikan peserta didik khususnya jurusan akuntansi untuk memahami adanya pendidikan antikorupsi, mampu menerapkan nilai antikorupsi sebagai pembiasaan dan keteladanan di kehidupan sehari-hari dan sejalan dengan visi misi sekolah yang mengharapkan seluruh peserta didik khususnya jurusan akuntansi untuk menjadi individu yang mandiri. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga bulan Maret 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus agar dapat menangkap fenomena-fenomena yang ada di lapangan kemudian dikaji lebih mendalam. Tujuan studi kasus penelitian ini adalah ingin mendapatkan sebuah gambaran secara lebih detail dengan deskripsi dan pemahaman yang baik secara lebih mendalam tentang keseluruhan (kasus). Informan dalam penelitian ini adalah siswa kelas X bidang keahlian akuntansi di SMK. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 siswa yang digunakan untuk mengukur persepsi siswa. Teknik yang digunakan untuk memperoleh sampel adalah dengan teknik *purposive sampling*. Teknik ini digunakan dengan menentukan kriteria tertentu pada pemilihan informan. Kriteria informan yaitu siswa termasuk dalam kategori siswa yang berprestasi yaitu menduduki peringkat 1 sampai 10 dikelas dengan memiliki latar belakang sosial

keluarga kurang mampu. Penentuan kriteria pada informan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Crandall yang menyatakan bahwa individu yang berprestasi dianggap memiliki kemandirian yang lebih tinggi dari pada individu yang tidak berprestasi (Nakita, 2005). Alasan peneliti memilih siswa yang berasal dari keadaan sosial keluarga kurang mampu yaitu sesuai dengan pendapat Walgito (2010: 57) yang menyatakan bahwa situasi sosial yang berbeda-beda akan dapat membawa perbedaan hasil persepsi seseorang dan persepsi sosial akan terbentuk lebih cepat melalui lingkungan sosial terdekat individu. Lingkungan terdekat siswa dapat diketahui adalah lingkungan keluarga, sehingga peneliti memilih kriteria tersebut sebagai subjek penelitian. Teknik pengambilan subjek penelitian dengan *purposive sampling* ini bertujuan untuk mendapatkan data dari informan kunci secara langsung yaitu siswa SMK kelas X jurusan akuntansi agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*), observasi, dan teknik dokumentasi. Adapun untuk pengujian keabsahan datanya dalam penelitian ini akan dilakukan triangulasi data. Teknik uji validitas dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan uji validitas triangulasi ini menunjukkan hasil yang valid berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persepsi siswa tentang nilai kemandirian yang ditinjau dari aspek sosial pada Pendidikan Antikorupsi

Hasil analisis data kualitatif menunjukkan bahwa siswa memiliki persepsi yang positif mengenai nilai kemandirian yang ditinjau dari aspek sosial. Persepsi siswa pada aspek sosial ini dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang telah dilakukan sehingga menunjukkan bahwa siswa sudah memiliki sikap kemandirian yang ditinjau dari aspek sosial dengan baik dan sesuai dengan kriteria pada rubrik persepsi. Pada aspek sosial ini dibahas mengenai pengetahuan siswa tentang tindakan korupsi dan aspek sosial itu sendiri dari nilai kemandirian yang terdapat pada pendidikan antikorupsi. Pengetahuan siswa tentang tindakan korupsi diwujudkan melalui tindakan siswa dengan menyadari bahwa tindakan korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk dirinya sendiri. Pemberantasan korupsi didukung oleh penelitian yang dilakukan Asmorojati (2017: 496) yaitu memberantas korupsi harus dimulai dari masing-masing individu, karena adanya kesadaran bahwa melakukan korupsi adalah melakukan perbuatan sangat merusak sendi-sendi moral bangsa selain secara finansial korupsi tentu sangat merugikan negara. Siswa juga ikut serta berpartisipasi dalam memberantas tindakan korupsi yang dapat dimulai dari diri pribadi siswa. Siswa memiliki andil yang besar untuk ikut serta dalam memberantas tindakan korupsi yang saat ini telah marak terjadi. Penelitian dari Alfaqi (2016: 20) menyatakan bahwa salah satu yang harus didorong adalah keterlibatan pemuda dalam upaya pencegahan korupsi.

Persepsi siswa mengenai aspek sosial dari nilai kemandirian berdasarkan hasil observasi di kelas pada saat proses pembelajaran menunjukkan bahwa kemandirian yang bisa ditunjukkan siswa yaitu kemampuan siswa dalam bersosialisasi di mana saja terutama pada saat di lingkungan sekolah. Siswa mampu berinteraksi dengan teman-temannya, berinteraksi dengan guru di kelas, siswa mudah menyesuaikan diri, beradaptasi dengan teman-teman terutama pada saat mengikuti ekstrakurikuler. Pada hal ini juga siswa berani berinteraksi dengan guru terutama pada saat siswa mengalami kesulitan belajar dan siswa akan bertanya dengan guru ketika siswa mengalami kesulitan dalam hal tersebut sehingga dari hal tersebut siswa mampu dikatakan sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan yang memadai dalam upaya untuk meningkatkan kemandiriannya secara personal.

Karakter kemandirian penting untuk dimiliki oleh setiap individu terutama pada siswa, hal tersebut dapat dikatakan penting karena pada nilai ini seseorang diharapkan untuk tidak terlalu bergantung dengan masyarakat sekitar. Seseorang yang memiliki kemandirian merupakan orang yang selalu percaya akan setiap kemampuan yang dimiliki dirinya sendiri dalam menyelesaikan setiap pekerjaan, mampu bertanggungjawab dan tentu berani mengambil resiko yang ada. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Desmita (2009: 185-186) dalam (Suid, Syafrina & Tursinawati, 2017: 72) yang mengemukakan bahwa orang yang mandiri akan memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya sendiri, mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi, memiliki kepercayaan diri dalam

melaksanakan tugas-tugasnya, dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.

Kemandirian pada aspek sosial ini mampu ditunjukkan siswa dengan kemampuannya berinteraksi dengan orang lain tanpa bergantung dan menunggu aksi dari orang lain, membantu orang lain yang mengalami kesulitan atas kemauannya sendiri tanpa paksaan dan perintah dari orang lain. Siswa sudah mampu mengatur kehidupan masing-masing dengan berusaha tanpa harus selalu bergantung dengan orang lain, siswa juga memiliki upaya untuk selalu meningkatkan kemandiriannya, dan tentunya siswa juga berusaha meningkatkan kemandirian dengan cara mau menjalin interaksi dengan baik di lingkungannya terutama pada saat berada di lingkungan sekolah.

Interaksi sosial dan penyesuaian diri pada setiap individu mempunyai pengaruh terhadap perkembangan seseorang dalam meningkatkan kemandirian yang dimiliki. Interaksi sosial dapat dilakukan oleh setiap individu dengan kelompok primer dan sekunder seperti keluarga, teman, dan lingkungan tempat tinggal. Kemandirian pada aspek sosial ini dapat diwujudkan dengan berani membina relasi dengan individu yang lain dan menghindari sikap individual tanpa mau untuk peduli terhadap orang lain disekitarnya, meluangkan waktu untuk membantu dan menuntaskan pekerjaan di rumah, selalu melakukan persaingan yang sehat dan tidak melakukan suap. Selain itu pada aspek ini juga berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menepati janji sosial, tidak diskriminatif, dan selalu menghargai kebudayaan lokal setiap masyarakat.

Persepsi siswa tentang nilai kemandirian yang ditinjau dari aspek ekonomi pada Pendidikan Antikorupsi

Hasil analisis data kualitatif menunjukkan bahwa siswa memiliki persepsi negatif pada aspek ekonomi dari nilai kemandirian pada pendidikan antikorupsi. Pada penelitian dibahas mengenai dua hal yang berkaitan dengan aspek ekonomi pada nilai kemandirian yaitu siswa cenderung konsumtif dalam mengalokasikan uang saku dan siswa belum mampu mendahulukan kebutuhan sesuai dengan hidupnya. Persepsi siswa pada aspek ekonomi ini dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang telah dilakukan dengan acuan dari rubrik persepsi sehingga dapat dilihat hasilnya melalui matrik persepsi aspek ekonomi.

Persepsi siswa mengenai kecenderungan konsumtif dalam mengalokasikan uang saku ini dapat dilihat pada sikap siswa yang memperlihatkan bahwa jumlah pengeluaran uang saku untuk hal di luar kebutuhan sekolah masih sangat tinggi. Terlihat pula pada sikap beberapa siswa yang belum mampu menyisihkan sebagian uang saku untuk memenuhi berbagai kebutuhannya di sekolah. Gaya hidup yang konsumtif dan serba instan menjadikan siswa sering mengeluarkan uang untuk membeli apa saja yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Pola kehidupan siswa di era yang modern seperti ini cenderung lebih mendekatkan mereka pada hal-hal yang bersifat konsumtif. Hal itu akibat dari kurangnya pengetahuan siswa dalam mengalokasikan keuangan yang membuat siswa mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, padahal siswa mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara menyisihkan uang saku yang mereka miliki.

Persepsi siswa mengenai belum mampu mendahulukan kebutuhan sesuai dengan

hidupnya yaitu dapat dilihat pada sikap beberapa siswa yang belum mampu membedakan antara kebutuhan atau hanya sekedar keinginan dalam mengalokasikan keuangan pribadi. Siswa juga belum mampu mengelola keuangan sehari-hari sesuai dengan tingkatannya yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil wawancara juga memperlihatkan bahwa jumlah pengeluaran untuk tingkatan sekunder lebih besar dari pada untuk kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder siswa yang lebih tinggi seperti pembelian kuota internet, pembelian makanan pada saat di sekolah, dan pembelian aksesoris seperti pakaian.

Siswa jurusan akuntansi di SMK memang diharapkan memiliki kemampuan yang lebih daripada siswa dari jurusan yang lain mengenai pengalokasian keuangan pribadi dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Kemampuan pengelolaan keuangan ini sangat diperlukan untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan siswa di masa yang akan datang. Rapih (2016: 15) menjelaskan bahwa kemampuan pengelolaan keuangan menjadi sangat penting diterapkan pada kehidupan sehari-hari karena digunakan untuk menghadapi situasi-situasi krisis yang bisa terjadi setiap saat.

Hal di atas juga dapat didukung pula pada penelitian yang dilakukan oleh Wildayati (2018: 138) dengan mengacu pada *survey* yang telah dilakukan oleh Susenas Maret 2014-2015 (BPS, 2016) hasil *survey* menunjukkan rata-rata per kapita perbulan untuk makan terjadi penurunan dari 50,04% tahun 2014 menjadi 47,47% di tahun 2015, sedangkan pengeluaran untuk non makanan mengalami peningkatan yaitu dari 49,96% di tahun 2014 meningkat menjadi 52,53% pada tahun 2015. Sebagian besar penda-

patan yang diperoleh lebih banyak digunakan untuk pengeluaran membeli makanan dan non makanan seperti untuk membeli *smartphone*, bahan bakar, pakaian, paket data dan lain-lain. Pola hidup konsumtif tersebut menjadikan seseorang untuk cenderung tidak menyisihkan dari pendapatannya.

SIMPULAN

Simpulan

(1) siswa memiliki persepsi positif terhadap pengetahuannya tentang tindakan korupsi, upaya pemberantasan korupsi, dan kemandirian yang ditinjau dari aspek sosial pada pendidikan antikorupsi, (2) siswa memiliki persepsi yang negatif mengenai nilai kemandirian yang ditinjau dari aspek ekonomi.

Saran

Hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat berguna untuk:

Siswa

Siswa hendaknya selalu bersedia untuk ikut serta memberantas tindakan korupsi dan berani untuk mengatakan tidak pada semua tindakan yang mengarah pada tindakan korupsi. Siswa juga harus selalu berusaha untuk meningkatkan kemandirian personal karena siswa SMK memang disiapkan untuk mandiri dalam bersaing menghadapi dunia kerja. Pada saat di sekolah siswa juga harus bisa melakukan interaksi yang baik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa yang lain. Pada aspek ekonomi siswa harus dapat meningkatkan pemahaman mengenai kebutuhan dan keinginan sebe-

lum mampu mengalokasikan keuangan yang dimiliki dengan baik.

Guru

Guru harus mampu untuk konsisten dalam memberikan pembelajaran yang positif pada siswa. Guru juga harus selalu memberikan contoh pembiasaan yang positif pada siswa dengan selalu mengedepankan nilai-nilai karakter yang baik sesuai dengan pedoman atau modul yang telah ada. Guru juga dapat mengedepankan pada proses pembelajaran untuk menanamkan sikap atau nilai kemandirian pada siswa khususnya yang ditinjau dari aspek sosial dan ekonomi.

Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang sejenis dengan memperkuat nilai-nilai antikorupsi yang lain seperti nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kepedulian, dan keadilan sehingga diharapkan penelitian selanjutnya mengenai pemberantasan tindakan korupsi dapat diimplementasikan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaqi, Mifdal Zusron. (2016). Mendorong Peran Pemuda Dalam Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Antikorupsi. *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 1, No. 1, hal 19-24.
- Amri, Sofan., Jauhari, Ahmad., & Elisah, Tatik. (2011). *Implementasi Karakter Dalam Pembelajaran*. Jakarta: Prestasi Pustaka karya.
- Asmorojati, Anom Wahyu. (2017). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *University Research Colloquium*. Universitas Muhammadiyah Magelang. Hal: 491-498.
- Capasso, Salvatore & Santoro, Lodovico. (2018). Active and Passive Corruption: Theory and Evidence. *European Journal of Political Economy*, No. 52, hal 103.
- Dayati, Dayu Auliani. (2017). Kemandirian dan Penyesuaian Diri Remaja yang Menjadi Orangtua Tunggal di Yayasan Kharisma Pertiwi. *Jurnal Psikoborneo*. Vol 5, No 1, hal: 33-42.
- Gurning, Nuriani Laura Malau., Mudjiman, Harris., & Haryanto, Samsi. (2014). Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Warung Kejujuran di SMP Keluarga Kudus. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran*. Vol.2, No.1, hal 93-102.
- Hasil Catatan ICW Angka Kasus Korupsi di Indonesia*. (2018). Diperoleh 05 Juli 2018, dari <http://www.antikorupsi.org>.
- Mamitovaa, Zhanat A., et al. (2016). On Certain Aspects of Acts of Corruption Countermeasures. *International Journal Of Environmental & Science Education*. Vol. 11, No. 13, hal 5857.
- Mendiknas. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 20 tahun 2016 tentang *Standar Kompetensi Lulusan untuk Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Nakita. (2005). Menjadikan Anak Mandiri. *Jurnal Nakita*. April, hal: 13-19.
- Pratama, Andika & Sumaryati. (2015). Strategi Sekolah dalam Menanamkan Jiwa Antikorupsi di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, *Jurnal Citizenship*, Vol. 4 No. 2. Jakarta: 158-161.
- Qanumi, Ahmad Addib. (2015). *Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Kemandirian dan Prestasi Belajar Siswa Kelas XI IPS 1 di MAN 1 Bojonegoro*. Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Sosial. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rapih, Subroto. (2016). Pendidikan Literasi Keuangan Pada Anak: Mengapa dan Bagaimana?. *Jurnal Scholaria*. Vol. 6 No. 2, hal: 14-28.

- Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi*. (2018). Diperoleh 2 Januari 2019, dari <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>.
- Suid, Syafrina & Tursinawati. (2017). Analisis Kemandirian Siswa dalam Proses Pembelajaran di Kelas III SD Negeri 1 Banda Aceh. *Jurnal Pesona Dasar*. Vol. 1 No.5, hal: 70 -81.
- Suradi. (2006). *Korupsi dalam Sektor Pemerintahan dan Swasta*. Yogyakarta: Gava Media.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Walgito, Bimo. (2010). *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Wibowo, A. (2013). *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widyastuti, Yeni. (2013). *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wijaya, David. (2014). *Pendidikan Antikorupsi Untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Indeks.
- Wildayati. (2018). Pengaruh Financial Behavior dan Literasi Keuangan Terhadap Saving Behavior. *Jurnal Elektronik Rekaman (Riset Ekonomi Bidang Manajemen Dan Akuntansi) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Galileo*. Vol. 2 No. 1, hal: 138-148.